



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangi pada bulan Februari 2019 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, Januari 2020
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Arman Syifa

NIP. 19690404 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	5
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	5
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	20
A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra).....	20
B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2019 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

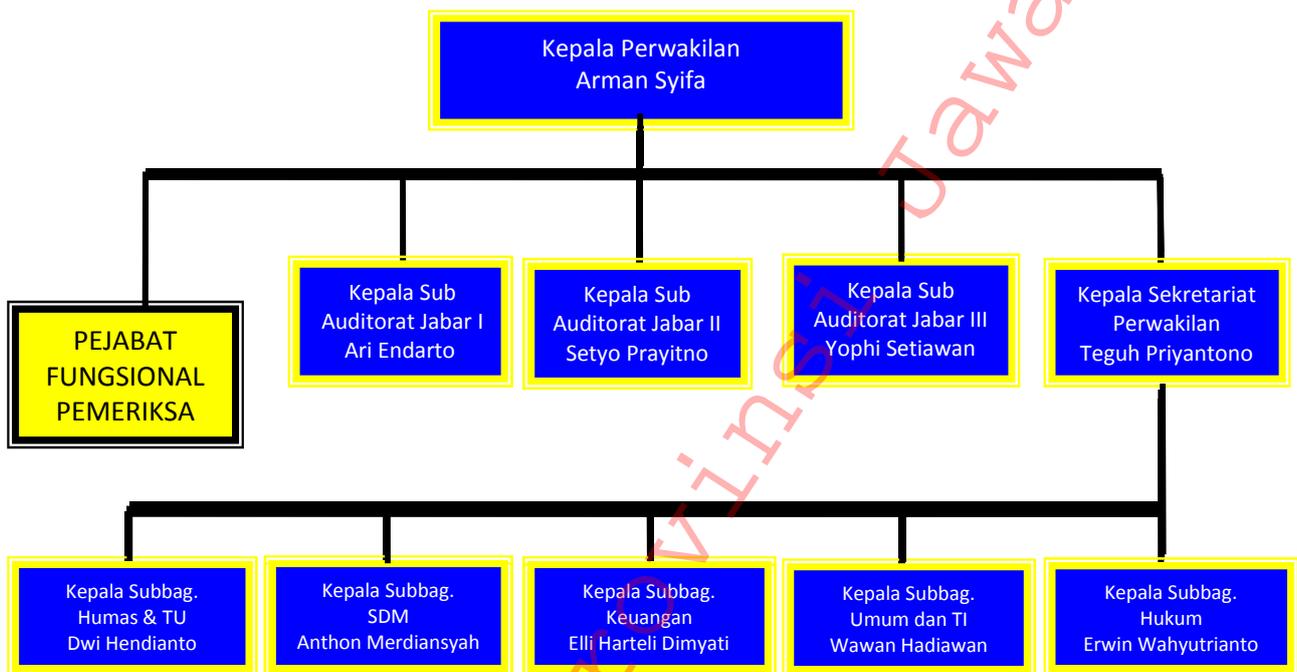
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI. Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Jawa Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Subauditorat Jawa Barat I

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Subauditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Subauditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulan Desember 2019 berjumlah 184 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 124 orang staf fungsional/teknis dan 51 orang staf penunjang pendukung (Sekretariat) dan 29 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2019 sebesar Rp42.751.382.000,00. Namun karena adanya kebutuhan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai akibat perubahan status dan komposisi pegawai, maka pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mendapat tambahan sebesar Rp207.315.000,00 dengan perubahan Pagu Anggaran sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1941/WPB.13/BD.0101/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Pengesahan Revisi Anggaran (Revisi IV) BPK RI TA 2019, Pagu Anggaran TA 2019 menjadi Rp42.958.697.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.544.208.568,00 atau 96,71% dari total anggaran.

Alokasi pagu anggaran tersebut terdistribusi pada empat layanan, yaitu (1) Layanan Pemeriksaan Keuangan Negara, (2) Layanan Sekretariat Perwakilan, (3) Layanan Internal (Overhead) dan (4) Layanan Perkantoran. Secara ringkas, perbandingan pagu dan penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	Pemeriksaan Keuangan Negara	23.096.265.000,00	21.784.102.778,00	94,32
	Sekretariat Perwakilan	2.208.388.000,00	2.184.877.593,00	98,94
	Internal (Overhead)	586.490.000,00	579.105.000,00	98,74
	Perkantoran	17.067.554.000,00	16.996.123.197,00	99,58
	Total DIPA 2019	42.958.697.000,00	41.544.199.568,00	96,71

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 - 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi : "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu :

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:

SS 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

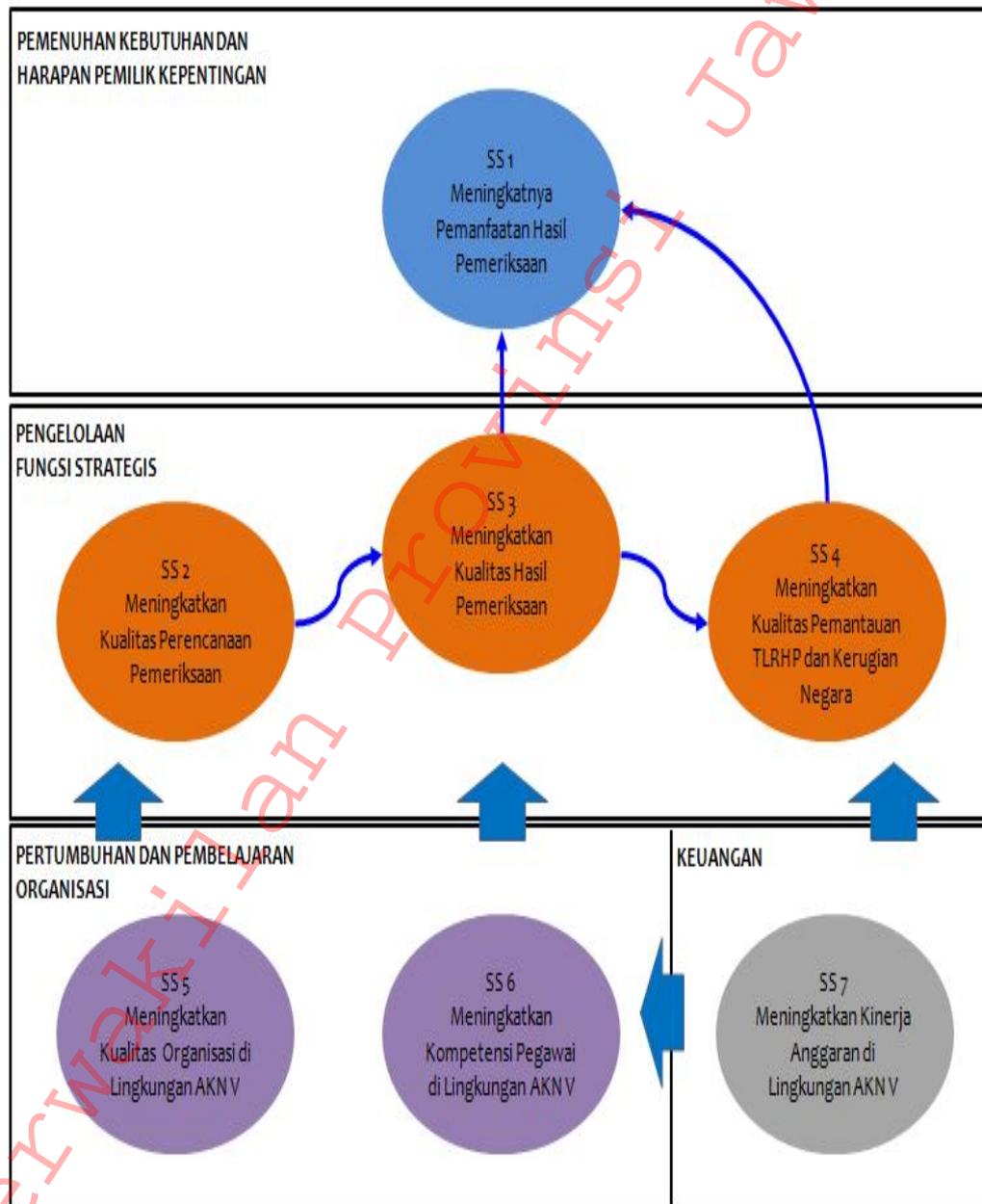
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

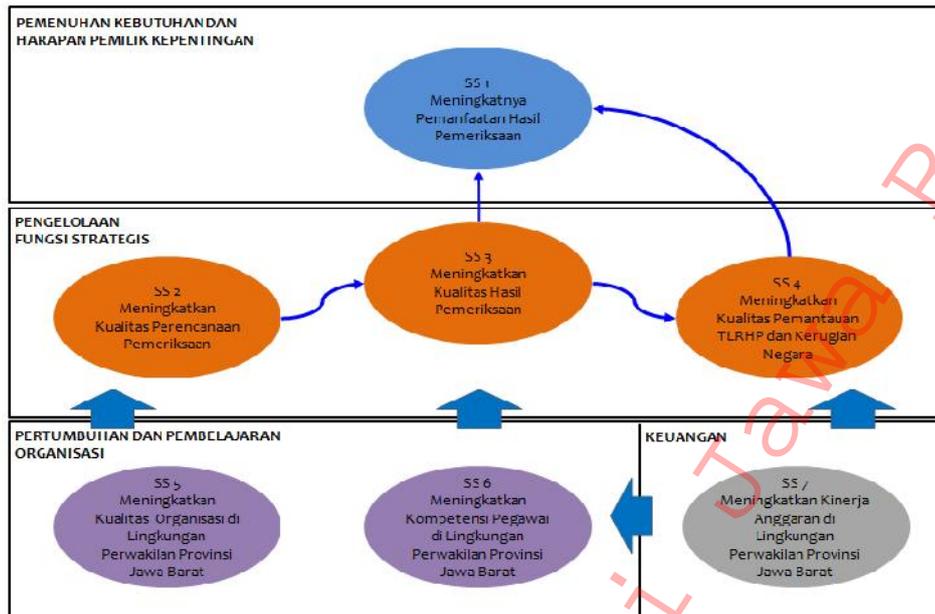
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei

atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peta strategis tersebut merupakan turunan dari Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan pendukung pencapaian sasaran strategis AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Peta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat :



Gambar 2.1 – Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK



Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalam mewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS	Indikator Kinerja	
SS 1	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
	1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
SS 2	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP
	2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP

SS	Indikator Kinerja	
SS 3	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
SS 4	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
	4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
SS 5	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice
	5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
SS 6	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
	6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
SS 7	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%
	IKU 2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%
	IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	16%	17%	18%	20%
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A
	IKU 2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0	0	0	0
	IKU 4. Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 7. Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada Februari 2019. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, yaitu :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja, serta Anggaran Tahun 2019
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Anggaran	Indikator Kinerja		Target
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp7.505.068.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp10.907.067.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%

Sasaran Strategis	Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp3.106.791.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp10.476.536.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp3,260.716.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp5.571.696.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%
		IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.620.296.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp303.212.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019, yang menetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Target 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	0%	75%	75%	75%	Desember	Pembahasan PTLRHP pada bulan Juli dan Bulan Desember 2019 dengan 28 Entitas (Inspektorat) dan Input pada aplikasi SIPTL
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Penyampaian Laporan Monitoring Penyampaian ke AUI secara bulanan kepada Kepala Perwakilan
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Penyampaian Laporan Monitoring PKN dan PKA dan Rapat Ekspose bersama AUI dengan APH.
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1	Desember	Meminta usulan dan pembahasan UBP dengan Subauditorat pada Agustus - September
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Rapat Pembahasan RKP
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%	0%	0%	0%	24%	Desember	Membandingkan RKP atas Pemeriksaan Kinerja dengan seluruh Pemeriksaan serta melakukan revisi RKP Kinerja jika diperlukan sesuai dengan Tematik Kinerja Pusat, terdapat 11 Kinerja
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	Membandingkan Simpulan LHP dengan Audit Objective
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	50%	100%	Desember	Pembahasan PTLRHP pada bulan Juli dan Bulan Desember 2019 dengan 28 Entitas (Inspektorat) dan Input pada aplikasi SIPTL
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	0	28	28	56	Desember	Pemantauan Kerugian dilaksanakan per Semester, pada bulan Juni dan Desember 2019

No.	Sasaran Strategis	Target 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Penginputan data dalam SIKAD dan Laporan Pemantuan Kerugian secara manual pada bulan Juli dan Desember 2019
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Mengumpulkan dan mendokumentasikan Form QC dan QA dari Tim Pemeriksaan.
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	0	3,9	3,9	3,9	Desember	Menyampaikan Kuesioner Kepuasan <i>Auditee</i> kepada Entitas setelah penyerahan LHP dilaksanakan.
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Melaksanakan Penyerahan LHP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan: 1. LKPD: akhir Mei 2019 2. Banparpol: April-Mei 2019; 3. Kinerja dan PDTT, menyesuaikan dengan P2 (bualn Desember 2019 dan Januari 2020).
IK 2.1.4	Persentase Gugatan LHP yang dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Monitoring dari Subbagian Hukum
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,0	0	0	0	5,0	Desember	Survei dilaksanakan oleh PSMK
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	0	0	0	5,0	Desember	Pengarahan Kepala Perwakilan pada Persiapan Pemeriksaan LKPD, Kinerja dan PDTT. Survei dilaksanakan oleh PSMK.
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Melakukan monitoring atas pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	-	-	-	AA	Desember	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai jadwal dan sesuai format dan masukan dari hasil Evaluasi Itama pada tahun sebelumnya
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Melakukan monitoring pemantauan secara berkala (per Triwulan) atas penggunaan layanan TI
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0	0	0	1	Desember	Akan disusun pada bulan September – Oktober 2019
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	0	0	0	100%	Desember	Akan disusun pada bulan September – Oktober 2019

No.	Sasaran Strategis	Target 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	52%	68%	84%	100%	Desember	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Output akan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya; Laporan Kinerja akan disampaikan per Triwulan paling lambat tanggal 30/31 pada bulan berikutnya.
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%	96%	96%	96%	96%	Desember	Pemantauan dan pemenuhan atas kebutuhan Sarana dan Prasarana.
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	0	1	1	1	Desember	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan <i>Press Release</i> pada setiap kegiatan Penyerahan LHP baik di Semester I maupun di Semester II; Melaksanakan <i>BPK Ulin ka Sakola</i> pada bulan Agustus/September 2019 di SMAN wilayah Jawa Barat; Melaksanakan Media Workshop pada bulan Agustus/September 2019. Melaksanakan <i>Radio Talkshow</i> pada bulan November 2019 di RRI.
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	Untuk diklat di perwakilan rencananya akan dilaksanakan 3 Diklat, yaitu 2 Diklat Teknis Pemeriksaan dan 1 Diklat Non Pemeriksa
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	10%	45%	70%	100%	Desember	
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	80%	80%	80%	80%	Desember	Monitoring anggaran dan realisasi anggaran setiap bulan, serta menyampaikan Laporan Realisasi DIPA kepada Biro Keuangan setiap bulannya.

Rencana kegiatan dalam Pencapaian Kinerja secara rinci sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan TLRHP pada Semester I 2019, dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari. 2. Pemantauan TLRHP pada Semester II 2019, dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari. 	Menyesuaikan juga dengan penginputan dalam SiPTL
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	Jika ada LHP yang mengandung unsur Pidana akan dikonsultasikan dan dikordinasikan lebih dahulu dengan Auditorat Utama Investigasi	IKU Bonus, sesuai target Tahun 2019 di setiap Triwulan.
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	Jika ada Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli akan dikordinasikan dan dikonsultasikan lebih dahulu dengan Auditorat Utama Investigasi dan dilakukan ekspos dengan Tim Pemeriksaan terkait	IKU Bonus, sesuai target Tahun 2019 di setiap Triwulan.
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	Usulan Bahan Pendapat (UBP) disampaikan pada Semester TW III atau TW IV, direncanakan pada bulan September 2019 Usulan dari setiap Subaud disampaikan pada bulan Agustus 2019.	UBP terkait tema Pemeriksaan Kinerja lokal di Perwakilan
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	<p>Semester I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2019); 2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28 entitas (setelah Pemeriksaan Pendahuluan/Interim LKPD). <p>Semester II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 11 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6 entitas. 	
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 11 entitas akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018, rencana LHP disampaikan pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020	Revisi RKP, Pemeriksaan Kinerja menjadi 12 entitas/obyek pemeriksaan
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	<p>Semester I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2019); <p>Semester II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 11 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6 entitas. 	Revisi RKP: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kinerja menjadi 12 entitas/obyek pemeriksaan. 2. PDDT Belanja menjadi 7 entitas/obyek pemeriksaan.

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pemantauan TLRHP pada Semester I 2019, dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari. Pemantauan TLRHP pada Semester II 2019, dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari.	Menyesuaikan juga dengan penginputan dalam SiPTL
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pada bulan Juli untuk 28 LHPT dan bulan Desember 2019 untuk 28 LHPT.	Menyesuaikan dengan jadwal penginputan dalam SIKAD
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	Penyampaian laporan pemantauan pada bulan Juli dan pada bulan Desember 2019, untuk penginputan dalam SIKAD disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan EPP.	Menyesuaikan dengan jadwal penginputan dalam SIKAD
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	Dilaksanakan untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan, yaitu: Semester I: 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2019); 2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28 entitas (setelah Pemeriksaan Pendahuluan/Interim LKPD). Semester II: 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 11 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6 entitas.	Revisi RKP: 1. Pemeriksaan Kinerja menjadi 12 entitas/obyek pemeriksaan. 2. PDDT Belanja menjadi 7 entitas/obyek pemeriksaan.
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	Penyebaran kuesioner kepada entitas dilakukan setelah kegiatan Pemeriksaan atau pada saat kegiatan pemeriksaan akan berakhir dan LHP diserahkan	Untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan (kecuali DTT Banparpol)
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	1. Penyampaian LHP LKPD TA 2017 paling lambat disampaikan 31 Mei 2019; 2. LHP LPJ Banparpol paling lambat disampaikan akhir Mei 2018 (tiga bulan sejak LPJ diterima BPK); 3. LHP Kinerja paling lambat disampaikan 21 Desember 2019; 4. LHP DTT paling lambat disampaikan akhir Januari 2019.	
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	Diharapkan untuk tahun 2019 tidak ada LHP yang digugat baik oleh entitas ataupun oleh pihak lainnya.	
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveyor	oleh Dit. PSMK

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveyor	oleh Dit. PSMK
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	Laporan monitoring Hukuman Disiplin dilaksanakan setiap bulan. Diharapkan tidak ada Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Peraturan Disiplin. Pegawai diharapkan patuh seluruhnya.	
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	Hasil penilaian/evaluasi oleh Itama atas Laporan Kinerja, diterima satker pada bulan September	
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai memanfaatkan update data pribadi, cuti, kehadiran, dll data kepegawaian melalui SISDM. 2. Penggunaan email bpk.go.id untuk pelaksanaan tugas sehari-hari; 3. Penggunaan aplikasi SMP utk menginput ST Pemeriksaan, LHP, TLRHP dan LHPT Runeg; 4. Penggunaan aplikasi SiAP LK dan SIPTL; 5. Pemanfaatan Portal Perwakilan sebagai penyimpanan arsip LHP, DEP, TLRHP dan LHPT Runeg. 	
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	Menyusun <i>best practice</i> yang sudah ada di Perwakilan sesuai format/pedoman yang telah ditetapkan dan akan disampaikan kepada Dit. PSMK sebagai usulan <i>best practice</i> .	
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	Melaksanakan implementasi/penerapan replikasi <i>best practice</i> "System Pelayanan Prima Perbendaharaan (SYANDRA)" menjadi "Pelayanan Terpadu Perbendaharaan (PETERPAN) pada Subbagian Keuangan.	
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Output akan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya; 2. Laporan Kinerja akan disampaikan per Triwulan paling lambat tanggal 30/31 pada bulan berikutnya. 	
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Fasilitas Kantor; 2. Penyediaan Jasa Konsultan KAP untuk dan atas nama BPK pada LKPD TA 2018; 3. Pengadaan Meubeler Gedung Kantor; 4. Perawatan Gedung dan Bangunan Kantor dan Rujab/Mess; 5. Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi; 6. Pengadaan Mesin dan Peralatan lainnya; 7. Pengadaan Cleaning Service dan Service Gedung Kantor; 	

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan <i>Press Release</i> pada setiap kegiatan Penyerahan LHP baik di Semester I maupun di Semester II; 2. Melaksanakan BPK <i>Ulin ka Sakola</i> pada bulan Agustus/September 2019 di SMAN Kabupaten Bandung Barat; 3. Melaksanakan Media Workshop pada bulan Agustus/September 2019. 4. Melaksanakan Radio <i>Talkshow</i> pada bulan November 2019 di RRI. 	
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	<p>Untuk memenuhi JP Pemeriksa, akan dilaksanakan 3 (tiga) Diklat Teknis Pemeriksaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Teknis dalam rangka persiapan LKPD pada bulan Januari atau Februari 2019; 2. Diklat Teknis (d disesuaikan kebutuhan Pemeriksa atas usulan dari Subauditorat) pada bulan Oktober 2019; 3. Diklat Teknis (d disesuaikan kebutuhan Pemeriksa atas usulan dari Subauditorat) pada bulan November atau Desember 2019 	Anggaran dari Badan Diklat
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	<p>Untuk memenuhi JP Pegawai Non Pemeriksa, akan dilaksanakan 1 (satu) Diklat Teknis, yaitu:</p> <p>Diklat Kesekretariatan pada bulan September atau Oktober 2019;</p>	Anggaran dari Badan Diklat
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen penganggaran dan pemantau pada setiap bulan; 2. Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada setiap bulan; 3. Menyusun laporan keuangan tahunan; 4. Menyusun laporan kegiatan pelaksana pada setiap bulan; 5. Menyusun laporan realisasi DIPA, laporan Target Penyelesaian Keluaran, dan laporan Kemajuan Paket Pengadaan pada setiap bulan. 	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra)

Dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun, tahun 2016 s.d. tahun 2019 banyak perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Satker berupa penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Perubahan penambahan IKU ini merupakan format/bentuk (*template*) IKU yang diberikan oleh Dit. PSMK kepada seluruh satker Perwakilan.

Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memandang perlu dilakukannya perubahan/revisi atas Renstra Satker tidak hanya untuk Perwakilan Jawa Barat, namun juga untuk seluruh satker agar dilakukan perubahan/revisi atas Renstra. Perubahan atas Renstra dimaksudkan agar Renstra yang sudah ada dapat mengakomodir dan sejalan dengan perkembangan dan perubahan pada Perjanjian Kinerja BPK secara keseluruhan.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berdasarkan hasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2019 adalah **99,27**. Skor kinerja Tahun 2019 ini menunjukkan sedikit peningkatan skor sebanyak 1,57 poin jika dibandingkan skor Tahun 2018 sebesar 97,70. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:

1. sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK) mencapai atau melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;
2. sebanyak 5 (tujuh) IK tidak mencapai target yang ditentukan dengan skor <100 (92,80 s.d. 99,47);
3. terdapat satu IK (IK 3.2.3) yang tidak tercapai atau tidak terlaksana realisasinya dengan skor 0;

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat				99,27
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,42%	103,22
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	105
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	25,53%	102,13
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,24	105
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,56	91,20
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,78	95,60
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,47	99,47
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	AA	100
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,92%	104,13
IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	0	0
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%	96,65	100,67
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	105

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	92,80%	92,80
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	95%	95
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	88,65	105

Capaian tersebut ada peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang tetap konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk semua sasaran strategis sebagai berikut:

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan empat IKU, yaitu IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.4 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

1. IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

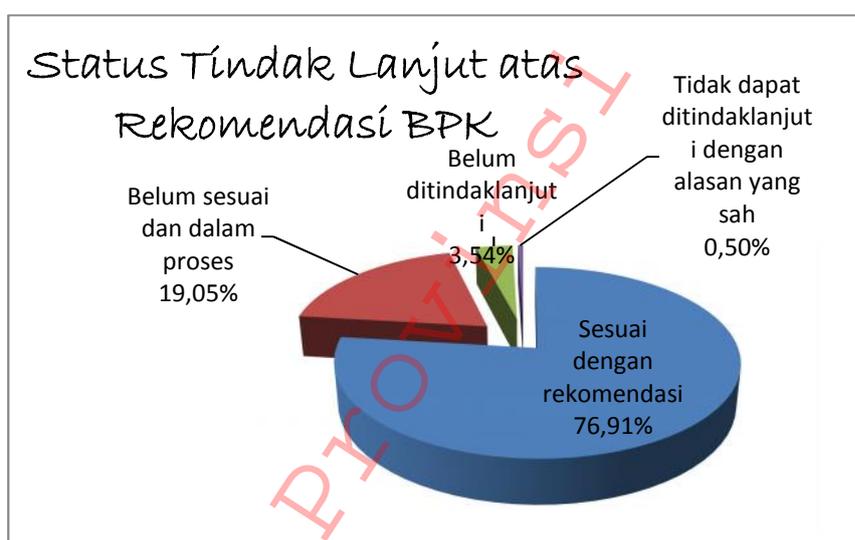
IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

**Tabel 3.2. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti
(sama dengan Data EPP yang dipergunakan dalam IHPS)**

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	18.213	76,91%
2	Belum sesuai dan dalam proses	4.510	19,05%
3	Belum ditindaklanjuti	838	3,54%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	119	0,50%
	Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	23.680	100,00%

Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK



Pencapaian atas IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2019 mencapai 77,42% dari 75% target yang ditetapkan dengan skor 105.

Perkembangan capaian IKU 1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 1.1 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU	Uraian	Target IKU				Realisasi dan Skor Capaian IKU			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	65%	75%	60,17 % dan 100,29	61,23 % dan 94,20	68,50 % dan 105	77,42 % dan 103,22

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, yaitu sebesar 77,42%, namun target tahun 2019 dinaikkan menjadi 75%, sehingga jika dibandingkan skor tahun 2019 dengan capaian skor tahun 2018 mengalami sedikit penurunan skor akibat target yang dinaikkan. Peningkatan capaian tersebut disebabkan, oleh karena di tahun 2019, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya persuasif kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada setiap semester dengan mengundang Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Jawa Barat ke Kantor Perwakilan serta beberapa upaya perbaikan melalui pihak Inspektorat Daerah.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mendorong peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan mengadakan acara Rapat Pemantauan Tindak Lanjut di Kantor Perwakilan, dengan mengundang pihak Inspektorat Pemda, yang dilaksanakan selama setiap semester, yaitu dilaksanakan pada:

- a. Rapat PTLRHP Semester I dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 26 Juni s.d. 2 Juli 2019;
- b. Rapat PTLRHP Semester II dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2019;
- c. Sosialisasi dan Pelatihan aplikasi SIPTL dengan mengundang Inspektorat Pemda se-Jawa Barat, pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPK Perwakilan Jawa Barat dengan Pihak Inspektorat Pemda se-Jawa Barat, yang salah satu poin komitmen bersama tersebut adalah “Mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) kepada para Kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI.

Selain itu, perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 dan disesuaikan dengan target adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	60%	65%	70% disesuaikan dgn target seluruh BPK menjadi 65%	75%	75%	60,17 %	61,23 %	68,50 %	77,42 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp310.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp231.347.895,00 atau 74,47%.

2. IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK yaitu pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Untuk tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH).

Perkembangan capaian IKU 1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 1.2 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU	Uraian	Target IKU				Realisasi dan Skor Capaian IKU			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100 dan 100	100 dan 100	100 dan 100	100 dan 100

Meskipun capaian IKU 1.2 pada tahun 2019 adalah 100%, walaupun tidak ada penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH selama kurun waktu 2019, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2018
1.2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp297.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 296.621.511,00 atau 99,73%.

3. IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut mewajibkan BPK untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2018, tidak Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan, oleh karena terhadap permintaan PKN sejak tahun 2018 sudah dialihkan atau harus disampaikan melalui unit Auditorat Investigasi yang berada di Kantor Pusat. Kewenangan dipenuhi atau tidaknya permintaan PKN adalah kewenangan dari unit Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan hanya menyampaikan dan melaporkan permintaan PKN tersebut ke unit Auditorat Utama Investigasi.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli ini diberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangka mendukung pemberantasan praktek korupsi atas keuangan negara.

Untuk tahun 2019, tidak ada permintaan Pemberian Keterangan Ahli oleh Pengadilan maupun APH kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan capaian IKU 1.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1.3 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU	Uraian	Target IKU				Realisasi dan Skor Capaian IKU			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	102% dan 102	101% dan 101	102% dan 102	100% dan 100
	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100 %	100 %	100 %	100 %	100% dan 100	103% dan 103		

IKU 1.3 ini merupakan IKU bonus, artinya apabila target pada IKU ini tidak tercapai maka tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sedangkan apabila tercapai dan melebihi target akan menambah skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2019 realisasi atas IKU ini mencapai 100%, karena tidak ada permintaan PKN dan PKA.

Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.3. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	102%	101%	102 %	100 %
						100%	103%		

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya, terutama atas hal-hal yang diperkirakan berindikasi kerugian negara/daerah. Selain itu, juga meningkatkan koordinasi dengan AUI dan IPH terkait temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah untuk dapat diyakinkan benar terjadi kerugian negara/daerah, sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan kerugian negara/daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp297.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp296.621.511,00 atau 99,73%.

4. IKU 1.4 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

Pemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, maka seluruh satker pemeriksaan termasuk Perwakilan Provinsi Jawa Barat di dorong untuk memberikan masukan kepada Ditama Revbang.

Selama tahun 2019 terdapat satu usulan bahan pendapat dari Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu: *"Kebijakan dan Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Tidak Seragam Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bekerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Jawa Barat"*. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaian untuk IKU 1.4. ini adalah 1 dengan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 1.4 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU	Uraian	Target IKU				Realisasi dan Skor Capaian IKU			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1 dan 100	1 dan 100	1 dan 100	1 dan 100

Perbandingan realisasi IKU 1.4 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.4. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	2	1	1	1	1

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.4, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.134.000,00 atau 52,74%.

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Strategi ini diukur dengan tiga IK, yaitu IK 1.1.1 - Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan, 1.1.2 - Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP dan 1.1.3 - Tingkat Evaluasi LHP.

1. IK 1.1.1 - Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IK 1.1.1. ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari kesesuaian rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) dan kesesuaian antara *Audit Objective* (AO) dan *Tentative Strategic Audit Objective* (TSAO). Penilaian IK ini dilakukan atas LHP Kinerja dan PDDT (Non Banpol).

Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas;
- b. Pemeriksaan atas LPJ Banparpol pada 28 entitas;
- c. Pemeriksaan Kinerja, yang terdiri dari:
 - 1) Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, pada 2 entitas;
 - 2) Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan, pada 3 entitas;

- 3) Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 3 entitas;
 - 4) Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Barat, pada 1 entitas; dan
 - 5) Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal atas Pengelolaan BUMD, pada 3 entitas.
- d. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal/Daerah terkait Infrastruktur) pada 7 entitas.

IK ini merupakan IKU baru di Tahun 2019, menggantikan IKU 2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan. Pencapaian IK ini adalah 100% dengan skor 105, capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 95%. Capaian tersebut sama jika dibandingkan dengan Skor Tahun 2018.

Perkembangan capaian IK 1.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IK 1.1.1 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	90%	95%	85% dan 100	95% dan 105	100% dan 105	100% dan 105

Perbandingan realisasi IK 1.1.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.1.1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	90%	90%	90%	85%	95%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.583.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.076.062.549,00 atau 93,31%.

2. IK 1.1.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

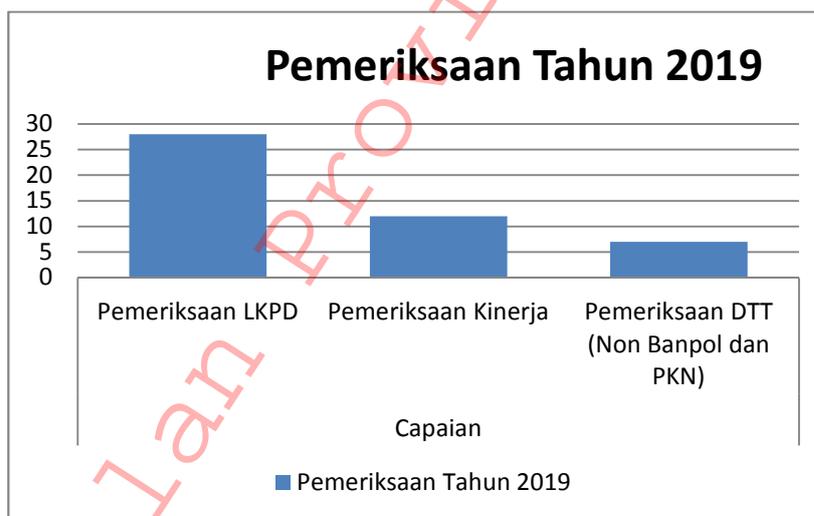
Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Tujuan IK 1.1.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam Tahun 2019 mencapai 12 LHP dari seluruh jumlah LHP yang diterbitkan selama tahun 2019 yaitu sebanyak 47 LHP (LHP non Banpol).

Pencapaian IK ini adalah 25,53% melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 25%. Dengan skor IK: 102,13. Hal ini terjadi dikarenakan penambahan 1 Obyek Pemeriksaan Kinerja, yang sebelumnya ditargetkan 11 Obyek Pemeriksaan, menjadi 12 Obyek Pemeriksaan Kinerja, tanpa menambah/merubah anggaran dalam RKP. Sehingga output yang dihasilkan menjadi 12 LHP.

**Gambar 3.2. Pemeriksaan yang dilaksanakan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**



Pemeriksaan Kinerja tersebut, terdiri dari:

- Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, pada 2 entitas;
- Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan, pada 3 entitas;
- Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 3 entitas;
- Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Barat, pada 1 entitas; dan
- Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal atas Pengelolaan BUMD, pada 3 entitas.

Perkembangan capaian IK 1.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IK 1.1.2 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2018
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	22%	17%	20%	25%	22,50 % dan 102,30	17,39 % dan 102,29	21,74 % dan 105	25,53 % dan 102,13

Perbandingan realisasi IK 1.1.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.1.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	15% menjadi 22% (karena ada revisi output RKP)	16% Menjadi 17% (karena ada revisi output RKP)	17% menjadi di 20% (menyesuaikan dgn RKP)	18% menjadi 25% (menyesuaikan dgn RKP dan revisi RKP 2019)	20%	22,50 %	17,39 %	21,74 %	25,53 %

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.439.045.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.081.896.549,00 atau 91,95%.

3. IK 1.1.3 - Tingkat Evaluasi LHP

IK 1.1.3. ini mengukur analisis implementasi strategi pemeriksaan dari kesesuaian antara simpulan dalam LHP Kinerja dan LHP DTT dengan *Tentative Strategic Audit Objective* (TSAO). Pengukuran dan analisis dilakukan oleh Dit. PSMK.

IK ini merupakan IK yang baru dan menggantikan IKU 3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP yang baru ada pada PK Tahun 2018. Pencapaian IK ini di Tahun 2019 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Dengan skor IK: 100. Dibandingkan skor Tahun 2018 mengalami penurunan, namun hal tersebut karena adanya kenaikan target yang ditetapkan, dari 80%, di Tahun 2019 target menjadi 100%.

Perkembangan capaian IK 1.1.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IK 1.1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IKU				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	N/A	N/A	80%	100%	N/A	N/A	100% dan 105	100% dan 100

Perbandingan realisasi IK 1.1.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.1.3. Tingkat Evaluasi LHP	N/A	N/A	80%	80%	80%	N/A	N/A	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.671.917.985,00 atau 92,52%.

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Strategi ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IK 1.2.1 – Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IK 1.2.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IK 1.2.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

1. IK 1.2.1 – Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Pencapaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100. Sama dengan skor sebelumnya di Tahun 2019.

Perkembangan capaian IK 1.2.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IK 1.2.1 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.2.1	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100

Pemenuhan target tersebut dapat tercapai melalui percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dilakukan secara berkala dalam bentuk forum/rapat pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah (Inspektorat) di wilayah Jawa Barat. Selain itu juga dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SiPTL).

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mendorong peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan mengadakan acara Rapat Pemantauan Tindak Lanjut di Kantor Perwakilan, dengan mengundang pihak Inspektorat Pemda, yang dilaksanakan selama setiap semester, yaitu dilaksanakan pada:

1. Rapat PTLRHP Semester I dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 26 Juni s.d. 2 Juli 2019 dan Rapat PTLRHP Semester II dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2019;
2. Sosialisasi dan Pelatihan aplikasi SIPTL dengan mengundang Inspektorat Pemda se-Jawa Barat, pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPK Perwakilan Jawa Barat dengan Pihak Inspektorat Pemda se-Jawa Barat, yang salah satu poin komitmen bersama tersebut adalah "Mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) kepada para Kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI.

Perbandingan realisasi IK 1.2.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.2.1 Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp445.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp343.981.047,00 atau 77,20%.

2. IK 1.2.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IKU 1.1.2 bertujuan untuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sejumlah 56 LHP dengan skor kinerja 100. Nilai IK 1.2.2 ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan sejumlah 56 LHP.

Perkembangan capaian IK 1.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IK 1.2.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56 dan 100	56 dan 100	56 dan 100	56 dan 100

Perbandingan realisasi IK 1.2.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56	56	56	56	56

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp860.194.000,00 dengan realisasi sebesar Rp684.966.921,00 atau 79,63%.

3. IK 1.2.3 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Merupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (d.h.i Direktorat EPP) dengan tembusan Ditama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu.

Pencapaian IK ini dalam tahun 2019 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yang hanya mencapai 91,07% dengan skor 91,07.

Perkembangan capaian IK 1.2.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IK 1.2.3 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100 %	100 %	100 %	100 %	62,50 % dan 62,50	67,86 % dan 67,86	91,07 % dan 91,07	100% dan 100

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sejumlah 56 LHPT Runeg, namun demikian penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2019 yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang sebanyak 28 LHPT Runeg, demikian pula pada Semester II Tahun 2019, laporan yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang sebanyak 28 LHPT Runeg.

Untuk tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat lebih berusaha dan berupaya dengan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LHPT Runeg ke Ditama Revbang dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan pemantauan dengan batas waktu yang ditetapkan dalam penyampaian LHPT dan penginputannya dalam aplikasi SIKAD, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Perbandingan realisasi IK 1.2.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	62,50 %	67,86 %	91,07 %	100 %

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp860.194.000,00 dengan realisasi sebesar Rp684.966.921,00 atau 79,63%.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Strategis ini diukur dengan empat IKU, yaitu IK 2.1.1 - Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, IK 2.1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, IK 2.1.3 - Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, dan IK 2.1.4 - Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK.

1. IK 2.1.1 – Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

Quality Control bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dalam rangka mengendalikan mutu pemeriksaan. *Quality Assurance*

dalam pemeriksaan adalah aktivitas revidu atas pengendalian mutu (*quality control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *Quality Assurance* dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pemenuhan skor atas IK 2.1.1 dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Untuk tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan *Quality Control* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan skor 100. Dibandingkan dengan Tahun 2018, capaian tersebut sama, yaitu 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IK 2.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IK 2.1.1 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100

Perbandingan realisasi IK 2.1.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.671.917.985,00 atau 95,52%.

2. IK 2.1.2 – Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Pencapaian atas IK 2.1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK untuk tahun 2019 mencapai 4,24 dari target indeks sebesar 3,90 yang ditetapkan dengan skor 105. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, sedikit penurunan 0,16, namun dengan skor yang masih sama yaitu sebesar 105.

Perkembangan capaian IK 2.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IK 2.1.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	4,10	3,90	4,26 dan 105	4,31 dan 105	4,40 dan 105	4,24 dan 105

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	4,10	3,6	3,6	4,26	4,31	4,40	4,24

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.671.917.985,00 atau 95,52%.

3. IK 2.1.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas pemeriksaan/stakeholder berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran

IKU ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDDT (termasuk Banpol), dan kinerja pada periode tertentu.

Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yang hanya mencapai 98,65% dengan skor 98,65. Tercapainya IKU ini dikarenakan penyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Semester I dan Semester II dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan maupun yang ditetapkan dalam P2.

Perkembangan capaian IK 2.1.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IK 2.1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	65,82 % dan 65,82	62,16 % dan 62,16	98,65 % dan 98,65	100% dan 100

Perbandingan realisasi IK 2.1.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65,82 %	62,16 %	98,65 %	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.671.917.985,00 atau 95,52%.

4. IK 2.1.4 – Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa jika ada LHP yang digugat dan dinyatakan menang bagi BPK di pengadilan. IKU ini di BPK Perwakilan baru diterapkan pada tahun 2017.

IKU ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah saji atau tiada salah saji (*zero defect*) pada LHP, sehingga dapat memitigasi resiko LHP yang digugat dan BPK dinyatakan

kalah. Jika ada LHP yang sampai digugat dan BPK dinyatakan kalah, berarti menunjukkan bahwa kualitas LHP itu kurang baik. Namun jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka berarti LHP tersebut berkualitas dan sudah sesuai dengan SPKN.

Capaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IK 2.1.4 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IK 2.1.4 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	N/A	100 %	100 %	100 %	N/A	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100

Selain itu, perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, walaupun mulai di tahun 2017 sudah masuk dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.4, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp297.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp296.621.511,00 atau 99,73%.

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai dasar BPK, dan IK 3.1.3 – Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

1. IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pemahaman pegawai di BPK Perwakilan dalam mengetahui dan memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, baru ditetapkan pada PK 2018 serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPK Perwakilan Tahun 2016 – 2020.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 4,56, dengan skor 91,20. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan capaian pada Tahun 2018 yang hanya sebesar 3,83 dengan skor 76,6, walaupun capaian Tahun 2019 inipun juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,00.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai atas visi, misi dan nilai dasar BPK. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPK melalui pengarahannya Kepala Perwakilan dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungan kerja juga dengan TV Informasi yang berada di lobi dan di Kafe Mandiri Kantor Perwakilan.

Perkembangan capaian IK 3.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IK 3.1.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	N/A	N/A	3,83 dan 76,6	4,56 dan 91,20

Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IK ini baru ada di tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun

demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	N/A	N/A	N/A	3,83	4,56

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp381.732.000,00 dengan realisasi sebesar Rp378.877.160,00 atau 99,25%.

2. IK 3.1.2 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pegawai di BPK Perwakilan dalam mengimplementasikan nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas dan Profesional. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pihak auditee serta masyarakat umum, yang pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

IK ini merupakan IK baru yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, dan baru ditetapkan pada PK 2018 serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPK Perwakilan Tahun 2016 - 2020.

Capaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 4,78, dengan skor 95,60. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan capaian pada Tahun 2018 yang hanya sebesar 4,47 dengan skor 89,4, walaupun capaian Tahun 2019 inipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,00.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk mendorong peningkatan implementasi nilai-nilai dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan profesional dan personal. Upaya yang dilakukan adalah melalui pengarahan Kepala Perwakilan (terutama pada saat persiapan pemeriksaan/sebelum Tim Pemeriksa berangkat ke lapangan) dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemberian teladan yang baik dari para Pimpinan di Perwakilan menjadi motivasi bagi pegawai untuk menerapkannya secara berkelanjutan.

Perkembangan capaian IK 3.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IK 3.1.2 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	N/A	N/A	4,47 dan 89,4	4,78 dan 95,60

Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IKU ini baru ada di tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingkan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	N/A	N/A	N/A	4,47	4,78

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp381.732.000,00 dengan realisasi sebesar Rp378.877.160,00 atau 99,25%.

3. IK 3.1.3 - Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan yang melekat pada dirinya, seperti peraturan disiplin dan kode etik. Untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut, sejak tahun 2017 diterapkan IK 3.1.3 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin. IKU ini merupakan IKU yang baru ada di Tahun 2017 bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

IK 3.1.3 merupakan IK bonus yang tidak mempengaruhi skor capaian, tetapi jika ada, maka dapat mempengaruhi skor capaian. Capaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 99,47% dengan skor 99,47, hal tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%.

IK ini tidak tercapai karena ada 1 orang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena ketidakhadiran (absensi). Hal ini diberikan sebagai bentuk hukuman sekaligus pembinaan kepada yang bersangkutan, sehingga menjadi peringatan bagi pegawai yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin.

Perkembangan capaian IK 3.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IK 3.1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	100 %	100 %	100 %	N/A	100% dan 100	100% dan 100	99,47 % dan 99,47

Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IK ini baru ada di tahun 2017 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A	100%	100%	99,47 %

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.442.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.862.188,00 atau 99,24%.

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategi ini diukur dengan tujuh IKU, yaitu IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, IK 3.2.2 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.2.3 – Jumlah *Best-Practice* yang disusun, IK 3.2.4 - Tingkat Penerapan *Best-Practice*, IK 3.2.5 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, IK 3.2.6 - Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan IK 3.2.7 - Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan.

1. IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 314/ND/XI/08/2019, tanggal 1 Agustus 2019, perihal: Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 91,03 atau dengan kategori “AA” (Sangat Memuaskan) dengan skor 100. Dengan demikian, capaian atas IK 3.2.1 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Tahun 2018 yang hanya mencapai nilai 76,96 atau dengan kategori “BB” (Sangat Baik) dengan skor 88,89

Perkembangan capaian IK 3.2.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IK 3.2.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	AA	A dan 100	A dan 100	BB dan 88,89	AA dan 100

Perbandingan realisasi IK 3.2.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	BB	AA

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp363.469.000,00 dengan realisasi sebesar Rp361.650.110,00 atau 99,50%.

2. IK 3.2.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

Mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pemanfaatan TI dan tingginya biaya untuk membangun infrastruktur TI, maka membudayakan “IT Culture” di lingkungan organisasi merupakan syarat mutlak. Untuk itu, beberapa aplikasi TI dijadikan indikator dalam mengukur capaian IK 3.2.2 yaitu: SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, portal BPK dan portal e-Audit.

Pencapaian IK ini dalam tahun 2019 adalah 98,92% dengan skor 104,13. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 82,68% dengan skor 103,36.

Perkembangan capaian IK 3.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IK 3.2.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100 %	80%	80%	95%	79,36 % dan 79,36	75,69 % dan 94,61	82,68 % dan 103,36	98,92% dan 104,13

Target IK 3.2.2 pada tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa hal yang kurang yaitu pemanfaatan portal e-Audit belum maksimal walaupun sudah digunakan oleh pemeriksa, hal tersebut dikarenakan pemeriksa hanya akan mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest dari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SMP dan SIPTL sudah mencapai 100% dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Demikian pula pemanfaatan portal, e-drive dan SISDM sudah mulai diperhatikan oleh Pegawai, terutama pemanfaatan aplikasi SISDM untuk melihat data kehadiran pegawai.

Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2019 di Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan		
e-mail (20%)	e-drive (10%)	Portal (5%)	SISDM (30%)	SMP (15%)	e-audit (15%)	SIPTL (5%)
100%	100%	100%	96,40%	100%	100%	100%
100%			96,40%	100%		

Perbandingan realisasi IK 3.2.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	80%	95%	100%	79,36 %	75,69 %	82,68 %	98,92 %

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp45.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.015.531,00 atau 99,37%.

3. IK 3.2.3 – Jumlah *Best-Practice* yang disusun

IK 3.2.3 digunakan untuk mengukur penyusunan jumlah *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, untuk tahun 2018, IKU ini baru diukur. Capaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 0 dengan skor 0 atau belum dapat sesuai target yang ditetapkan sebesar 1. Capaian ini sama dengan capaian pada Tahun 2018.

Untuk Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga belum dapat menyampaikan usulan mengenai *Best Practice* yang ada dan disusun di Perwakilan kepada Dit. PSMK. Hal ini karena *best practice* yang mungkin ada sampai saat ini belum terdokumentasikan dengan baik dan belum dibuat pedoman atau SOP dalam pelaksanaannya, sehingga belum layak untuk dapat diusulkan. Oleh karenanya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum dapat menyampaikan usulan *best practice* di Tahun 2019.

Adapun perkembangan capaian IK 3.2.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IK 3.2.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang disusun	N/A*	N/A*	1	1	N/A*	N/A*	0 dan 0	0 dan 0

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

Perbandingan realisasi IK 3.2.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.3 Jumlah <i>Best-Practice</i> yang disusun	0	0	1	1	0	N/A*	N/A*	0	0

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

4. IK 3.2.4 – Tingkat Penerapan *Best-Practice*

IK 3.2.4 digunakan untuk mengukur penerapan/implementasi atas *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada suatu satker BPK, yang diterapkan atau direplikasikan pada satker yang lain dan disesuaikan dengan kondisi di satker yang melaksanakan replikasi tersebut. IKU ini baru diukur pencapaiannya pada tahun 2018.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 100% dengan skor 100, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2018.

Pengukuran tingkat penerapan *best practice* yang telah dipilih dan disosialisasikan pada Rakor Pelaksana BPK Tahun 2018 dan pada Forum Manajer IKU Semester I Tahun 2019, terdapat 8 (delapan) *best practice* terpilih yang dapat direplikasi oleh Satker lainnya. Berdasarkan Nota Dinas Kaditama Revbang No. 228/ND/XII/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Pengukuran Kinerja Implementasi *Best Practice* 2019.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan replikasi atas salah satu *best practice* dari 8 *best practice* yang terpilih oleh Tim Penilai. Pernyataan serta checklist pemenuhan satu *best practice* yang direplikasi telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. 254/ND/XVIII.BDG/09/2019 tanggal 25 September 2019, yaitu replikasi atas “Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA), yang merupakan *best practice* dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. *Best practice* ini diterapkan untuk memaksimalkan fungsi Subbagian Keuangan sehingga berbagai layanan perbendaharaan dapat dilaksanakan secara efisien, dan implementasinya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menjadi “Pelayanan Terpadu Perbendaharaan (PETERPAN)”.

Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.4 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IK 3.2.4 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	N/A*	N/A*	100%	100%	N/A*	N/A*	100% dan 100	100% dan 100

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

Perbandingan realisasi IK 3.2.4 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100%	100%	0%	N/A*	N/A*	100%	100%

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.4, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp363.469.000,00 dengan realisasi sebesar Rp361.650.110,00 atau 99,50%.

5. IK 3.2.5 –Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK 3.2.5 digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian Laporan Output dan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Keputusan BPK RI No. 6/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pelaksana BPK dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK.

Mengacu pada ketentuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Laporan Output dan Laporan Kinerja tepat waktu melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan, sehingga realisasi capaian IK 3.2.5 Tahun 2019 adalah 100% dengan skor 100, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2018.. Laporan Output disampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Kinerja disampaikan secara triwulanan yang ditujukan kepada

Kepala Direktorat PSMK, sedangkan Laporan Kinerja Tahunan disampaikan kepada Tortama KN V satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.5 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IK 3.2.5 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2018	2016	2017	2018	2019
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output	100 %	100 %	100%	100%	100% dan 100	83,33 % dan 83,33	100% dan 100	100% dan 100
	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja	100 %	100 %			100%	100%		

Perbandingan realisasi IK 3.2.5 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	output: 100%	output: 83,33%	100%	100%
						kinerja: 100%	kinerja: 100%		

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.5, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp295.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp294.006.970,00 atau 99,49%.

6. IK 3.2.6 - Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan. IK ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat

pemenuhan sarana dan prasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya memenuhi sarana dan prasarana di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah melakukan renovasi dan pemindahan Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang sebelumnya berada di sisi samping Kantor menjadi di depan Kantor sebelah lobi, dengan penambahan beberapa sarana berupa PC, dispenser dan rak serta meja kursi untuk memudahkan dan membuat nyaman pemohon informasi atau masyarakat yang berkunjung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Selain itu di lobi dalam dibuat Kafe Mandiri yang bertujuan sebagai kafe kejujuran, dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan menuju zona integritas di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mencapai pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja sebesar 96,65% dengan skor 100,67 atau melebihi dari target 96%. Dibandingkan capaian Tahun 2018 sama, namun dengan skor yang berbeda (penurunan skor), dikarenakan Tahun 2019 ada kenaikan untuk target yang sebelumnya 95% menjadi 96%.

Adapun perkembangan capaian IK 3.2.6 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IK 3.2.6 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	95%	96%	97,12 % dan 105	97,12 % dan 102,23	96,65 % dan 101,73	96,65% dan 100,67

Perbandingan realisasi IK 3.2.6 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	95%	96%	96%	97,12%	97,12%	96,65%	96,65%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.6, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.029.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.013.929.324,00 atau 98,47%.

7. IK 3.2.7 – Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

Media relation dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPK kepada *stakeholders* BPK, antara lain para insan media. Media merupakan sarana yang paling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2019 adalah:

- a. Siaran Pers pada saat Penyerahan LHP sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - 1) Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2018 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (DPRD) tanggal 27 Mei 2019;
 - 2) Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat TA 2018 (Tahap I) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2019;
 - 3) Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat TA 2018 (Tahap II) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Mei 2019;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Media Workshop "NgoPI Bareng BPK Jabar 2019" pada tanggal 30 Agustus 2019;
- c. Radio Talk Show di Pro 1 dan Pro 2 LPP RRI Bandung pada tanggal 18 September 2019.

Pencapaian IK ini dalam tahun 2019 adalah 3,90 dengan skor 105 atau melebihi target yang ditetapkan sebanyak 3,00. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2018.

Perkembangan capaian IK 3.2.7 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IK 3.2.7 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	3	3	3,4 dan 105	4,9 dan 105	3,9 dan 105	3,9 dan 105

Perbandingan realisasi IK 3.2.7 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	3	3	2	3,4	4,9	3,9	3,9

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.7, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp317.663.000,00 dengan realisasi sebesar Rp309.391.855,00 atau 97,40%.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IK 3.3.2 - Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

1. IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa per tahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

Untuk tahun 2019, realisasi IK 3.3.1 adalah sebesar 92,80% dengan skor kinerja 92,80. Nilai IK ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, walaupun sudah lebih baik dari capaian tahun 2018 yang hanya sebesar 89,26%. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya jam diklat pemeriksa dengan menyelenggarakan diklat teknis (diklat pemeriksaan) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu: Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Januari 2019). Untuk tahun 2019, diklat teknis yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali, oleh karena keterbatasan anggaran Badiklat.

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2019, target 100% pemeriksa memenuhi jam diklat tidak tercapai, dari 125 orang pemeriksa, hanya 116 orang pemeriksa yang memenuhi target 40 JP. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan.

Perkembangan capaian IK 3.3.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IK 3.3.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	85,45 % dan 85,45	88,52 % dan 88,52	89,26 % dan 89,26	92,80 % dan 92,80

Untuk tahun ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pemeriksa minimal 40 jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) diklat yang diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Badiklat.

Perbandingan realisasi IK 3.3.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	85,45 %	88,52 %	89,26 %	92,80 %

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.3.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.442.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.862.188,00 atau 99,24%.

2. IK 3.3.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban.

Untuk tahun 2019, capaian realisasi IK 3.3.2 adalah sebesar 95% dengan skor kinerja 95. Nilai IK ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan capaian Tahun 2018, capaian Tahun 2019 mengalami penurunan 5%.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk tercapainya jam diklat bagi pegawai di Sekretariat (Non Pemeriksa) dengan menyelenggarakan diklat teknis yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu: Diklat Korespondensi, Tata Naskah Kedinasan dan Aplikasi Perkantoran, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 September 2019. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2019, target 100% pegawai non pemeriksa memenuhi jam diklat tidak tercapai, dari 60 orang pegawai, hanya 57 orang pegawai yang memenuhi target 20 JP.

Untuk tahun ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pegawai non pemeriksa minimal 20 jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat sebanyak 1 (satu) kali diklat yang akan diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Badiklat.

Perkembangan capaian IK 3.3.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IK 3.3.2 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	100%	100%	62,90 % dan 69,89	87,27 % dan 96,97	100% dan 100	95% dan 95

Perbandingan realisasi IKU 3.3.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	100%	100%	93%	62,90%	87,27%	100%	95%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.3.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.442.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.862.188,00 atau 99,24%.

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

Pelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Melalui Strategi ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Strategi ini diukur dengan satu IKU, yaitu IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1. IK 3.4.1- Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tujuan IK 3.4.1 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi atas kinerja anggaran dilakukan pada tiga aspek, yaitu (1) aspek implementasi, (2) aspek manfaat dan (3) aspek kontek. IK 3.4.1 berfokus pada evaluasi atas aspek implementasi, yang dinilai dari empat indikator, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pencapaian IK ini pada Tahun 2019 mencapai 88,65% dengan skor 105 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Adapun capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut berdasarkan Hasil Penilaian dari Biro Keuangan, sebagai berikut:

Penilaian Biro Keuangan atas IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran				
Penyerapan Anggaran	Pencapaian Keluaran	Konsistensi	Efisiensi	Nilai Aspek Implementasi
95,10%	100%	99,58%	62,24%	88,65%

Jika dibandingkan untuk capaian nilai Aspek Implementasi Anggaran selama kurun waktu empat tahun, sebagai berikut:

Perbandingan Nilai Aspek Implementasi Anggaran					
Tahun	Penyerapan Anggaran	Pencapaian Keluaran	Konsistensi	Efisiensi	Nilai Implementasi
2019	95,10%	100%	99,58%	62,24%	88,65%
2018	95,43%	99,49%	70,20%	61%	82,76%
2017	91,31%	99,39%	86,68%	64,81%	86,40%
2016	93,03%	100%	80,92%	67,73%	91,40%

Perkembangan capaian IK 3.4.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IK 3.4.1 - Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK	Uraian	Target IK				Realisasi dan Skor Capaian IK			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	82%	85%	80%	91,40% dan 105	86,40% dan 105	82,76% dan 97,36	88,65% dan 105

Berdasarkan Tabel 3.29 di atas, capaian IK 3.4.1 tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 dan 2017. Peningkatan ini terjadi pada empat indikator, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 95,10% (sedikit menurun dibandingkan tahun 2018, namun naik jika dibandingkan tahun 2017), tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi yang mencapai 99,58%, tingkat pencapaian keluaran yang mencapai 100%, dan tingkat efisiensi yang mencapai 62,24% (meningkat dibandingkan tahun 2018, namun menurun jika dibandingkan tahun 2017). Peningkatan capaian atas IK 3.4.1 dikarenakan penurunan target Tahun 2019 dengan target 80%, sedangkan target Tahun 2018 sebesar 85%.

Adapun Tingkat Penyerapan Anggaran berdasarkan jenis layanan, sebagai berikut:

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	Pemeriksaan Keuangan Negara	23.096.265.000,00	21.784.102.778,00	94,32
	Sekretariat Perwakilan	2.208.388.000,00	2.184.877.593,00	98,94
	Internal (Overhead)	586.490.000,00	579.105.000,00	98,74
	Perkantoran	17.067.554.000,00	16.996.123.197,00	99,58
	Total DIPA 2019	42.958.697.000,00	41.544.199.568,00	96,71

Sedangkan perbandingan realisasi IK 3.4.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK	Target Tahun Renstra					Realisasi			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	82%	85%	85%	90%	91,40%	86,40%	82,76%	88,65%

Walaupun realisasi atas target IK 3.4.1 ini telah melebihi target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap akan melakukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target tahun 2020 yang lebih baik, terutama mencapai tingkat penyerapan yang optimal, menjaga tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran, serta

mengupayakan pencapaian keluaran yang lebih baik, dan berupaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran yang lebih baik.

Upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2020, antara lain:

- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
- c. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
- d. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan
- e. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.4.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp646.909.000,00 dengan realisasi sebesar Rp645.090.110,00 atau 99,72%.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi DIPA

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Realisasi DIPA Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/Keluaran/SubKeluaran	Output Keluaran (volume)			Anggaran (Rp)		%
	Target	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	
1 LHP BPK Perwakilan Jawa Barat	72	72	LHP	18.369.532.000,00	17.561.150.362,00	95,60%
a. LHP Keuangan	25	25	LHP	10.209.768.000,00	10.006.293.765,00	98,01%
b. LHP Kinerja	12	12	LHP	4.439.045.000,00	4.081.896.549,00	91,95%
c. LHP DTT (No Banpol)	7	7	LHP	3.144.190.000,00	2.994.166.000,00	95,23%
d. LHP DTT Banpol	28	28	LHP	576.529.000,00	478.794.048,00	83,05%
2 LHP KAP untuk dan atas nama BPK	3	3	LHP	2.224.313.000,00	2.110.767.623,00	94,90%
3 Laporan Pemantauan BPK	112	112	LHP	1.170.866.000,00	916.314.816,00	78,26%
a. Kerugian Daerah	56	56	LHP	860.194.000,00	684.966.921,00	79,63%
b. TLRHP	56	56	LHP	310.672.000,00	231.347.895,00	74,47%
4 Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Rumusan Bahan	11.630.000,00	6.134.000,00	52,74%
5 Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	1.161.540.000,00	1.064.626.589,00	91,66%
6 Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan IHPS	134.920.000,00	112.633.152,00	83,48%
7 Laporan Profil Entitas	2	2	Laporan	23.464.000,00	12.476.236,00	53,17%
8 Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20	Laporan	2.208.388.000,00	2.184.868.593,00	98,93%
a. Layanan Hukum Perwakilan	4	4	Laporan	297.413.000,00	296.621.511,00	99,73%
b. Layanan Kehumasan dan TU Perwakilan	4	4	Laporan	699.395.000,00	688.269.015,00	98,41%
c. Layanan SDM Perwakilan	4	4	Laporan	404.960.000,00	403.503.633,00	99,64%
d. Layanan Keuangan Perwakilan	4	4	Laporan	363.469.000,00	361.650.110,00	99,50%
e. Layanan Umum Perwakilan	4	4	Laporan	443.151.000,00	434.824.324,00	98,12%
9 Layanan Internal Overhead	1	1	Laporan	586.490.000,00	579.105.000,00	98,74%
10 Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	17.067.554.000,00	16.996.123.197,00	99,58%
Total	237	237		42.958.697.000,00	41.544.199.568,00	96,71%

Selama tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan dua kali revisi, yaitu:

- a. Revisi penambahan jumlah Keluaran LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari 73 LHP menjadi 75 LHP. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Sekjen BPK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 215/ND/XVIII.BDG/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan telah mendapat persetujuan Sekjen BPK melalui Surat Sekjen BPK RI No. 516/S/X/09/2019 tanggal 13 September 2019. Revisi ini tidak merubah alokasi pagu DIPA Tahun 2019.
- b. Revisi karena pagu minus Belanja Pegawai sebesar Rp207.315.000,00. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Biro Keuangan BPK RI melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 255/ND/XVIII.BDG/09/2019 tanggal 27 September 2019. Revisi ini menambah alokasi pagu DIPA Tahun 2019, dari semula sebesar Rp42.751.382.000,00 menjadi sebesar Rp42.958.697.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat hanya mampu merealisasikannya sebesar Rp41.544.208.568,00 atau 96,71% dari anggaran. Persentase penyerapan anggaran ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan persentase penyerapan tahun 2018, yaitu sebesar 96,48%.

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Realisasi Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Tindak atas Hasil	75%	77,42%	310.672.000,00	231.347.895,00	
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	297.413.000,00	296.621.511,00	Layanan Bidang Hukum
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	297.413.000,00	296.621.511,00	Layanan Bidang Hukum

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	11.630.000,00	6.134.000,00	
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	7.583.235.000,00	7.076.062.549,00	Pemeriksaan Kinerja: 12 entitas; Pemeriksaan DTT Non Banparpol: 7 entitas.
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	25,53%	4.439.045.000,00	4.081.896.549,00	12 LHP Kinerja
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	20.593.845.000,00	19.671.917.985,00	Pemeriksaan Keuangan: 28 LHP; Pemeriksaan Kinerja: 12 LHP; Pemeriksaan DTT Non Banparpol: 7 LHP. PDTT Banparpol: 28 LHP
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	445.592.000,00	343.981.047,00	
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56			
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	860.194.000,00	684.966.921,00	
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	20.593.845.000,00	19.671.917.985,00	75 LHP
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,24	20.593.845.000,00	19.671.917.985,00	75 LHP (75 entitas/auditee)
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	20.593.845.000,00	19.671.917.985,00	75 LHP

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	297.413.000,00	296.621.511,00	Layanan Bidang Hukum
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,56	381.732.000	378.877.160	Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pimpinan
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,78			
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,47%	76.442.000,00	75.862.188,00	Anggaran Layanan SDM, antara lain: Pengembangan Kompetensi dan penilaian Kinerja Pegawai
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	AA	363.469.000,00	361.650.110,00	Layanan Bidang Keuangan
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,92%	45.300.000,00	45.015.531,00	
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0	N/A	N/A)
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	363.469.000,00	361.650.110,00	Layanan Bidang Keuangan (implementasi <i>best practice</i> di Subbag Keuangan
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	295.505.000,00	294.006.970,00	
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%	96,65	1.029.641.000,00	1.013.929.324,00	
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	317.663.000,00	309.391.855,00	Anggaran Layanan Kehumasan, diantaranya PIK, Media Relation
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	92,80%	76.442.000,00	75.862.188,00	Anggaran Layanan SDM, yaitu Pengembangan Kompetensi dan penilaian

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	95%			Kinerja Pegawai, sedangkan anggaran pelaksanaan diklat berasal dari Badan Diklat
IK 3.4.1	Tingkat Implementasi Anggaran Kinerja	80%	88,65%	646.909.000,00	645.090.110,00	Layanan Bidang Keuangan dan Layanan Perkantoran

N/A : Indikator Kinerja tidak dapat dipetakan/identifikasi ke dalam anggaran dan realisasinya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2019 adalah 99,27, dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) yaitu: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH; Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli; Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang; Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan; Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP; Tingkat Evaluasi LHP; Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara; Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang; Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan; Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK; Ketepatan Waktu Penyampaian LHP; Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK; Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja;

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; Tingkat Penerapan *Best Practice*; Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja; Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana; Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan; dan Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 6 (enam) IK yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK;
2. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
4. IK 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang Disusun;
5. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan
6. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2019 yang menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK dan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Dit. PSMK melalui surveyor (pihak ketiga), masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai di BPK Perwakilan mengenai Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK. Selain itu dalam implementasinya dilapangan, masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh pegawai, karena penilaian tersebut adalah berdasarkan hasil survei kepada pihak eksternal. Ke depannya akan lebih banyak disampaikan pada saat pengarahan Pimpinan dan atau Kepala Perwakilan kepada pegawai khususnya pada saat persiapan pelaksanaan pemeriksaan dan dalam rapat-rapat internal.
2. Jumlah *best practice* yang disusun, belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2019, BPK perwakilan belum dapat menyampaikan kepada Dit. PSMK mengenai *Best Practice* yang ada dan disusun di Perwakilan, hal ini karena *best practice* yang mungkin ada belum terdokumentasikan dengan baik dan belum dibuat pedoman atau SOP dalam pelaksanaannya, sehingga belum layak untuk diusulkan sebagai *best practice*.
3. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan ataupun tugas kesekretariatan yang harus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatan yang tidak tepat dengan agenda kegiatan di perwakilan, selain itu sering kali jadwal diklat untuk pemeriksa yang ditawarkan pada semester I maupun pada semester II juga bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di lapangan. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah berupaya agar semua pemeriksa dapat memenuhi jam diklat dengan menyelenggarakan 1 (satu) diklat teknis pemeriksaan di Perwakilan, yaitu 1 (satu) diklat pada semester I, namun hal tersebut ternyata belum dapat memenuhi target untuk seluruh pemeriksa 40 JP. Demikian pula untuk diklat bagi pegawai non pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah berupaya dengan menyelenggarakan 1 (satu) diklat teknis bagi pegawai non pemeriksa yang dilaksanakan pada semester II di Perwakilan.

Pemeriksa maupun pegawai non pemeriksa yang belum mencukupi jam diklatnya pada saat pelaksanaan diklat di perwakilan, yang bersangkutan disaat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan ataupun tugas lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang akan melakukan beberapa upaya untuk lebih meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,42%	103
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
Strategi 1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%	105
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%	25%	102
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	100
Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,24	105
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,56	91,2
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,78	95,6
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,47%	99,47

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	AA	100
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,92%	104,13
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	0	0
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%	96,65	100
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	105
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	92,8	92,8
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	95%	95
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	88,65	105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019

: Rp42.751.382.000,00

Revisi Anggaran (Revisi IV) BPK RI TA 2019

: Rp42.958.697.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018

: Rp41.544.208.568,00



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Syifa, S.S.T., M.Acc., Ak.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

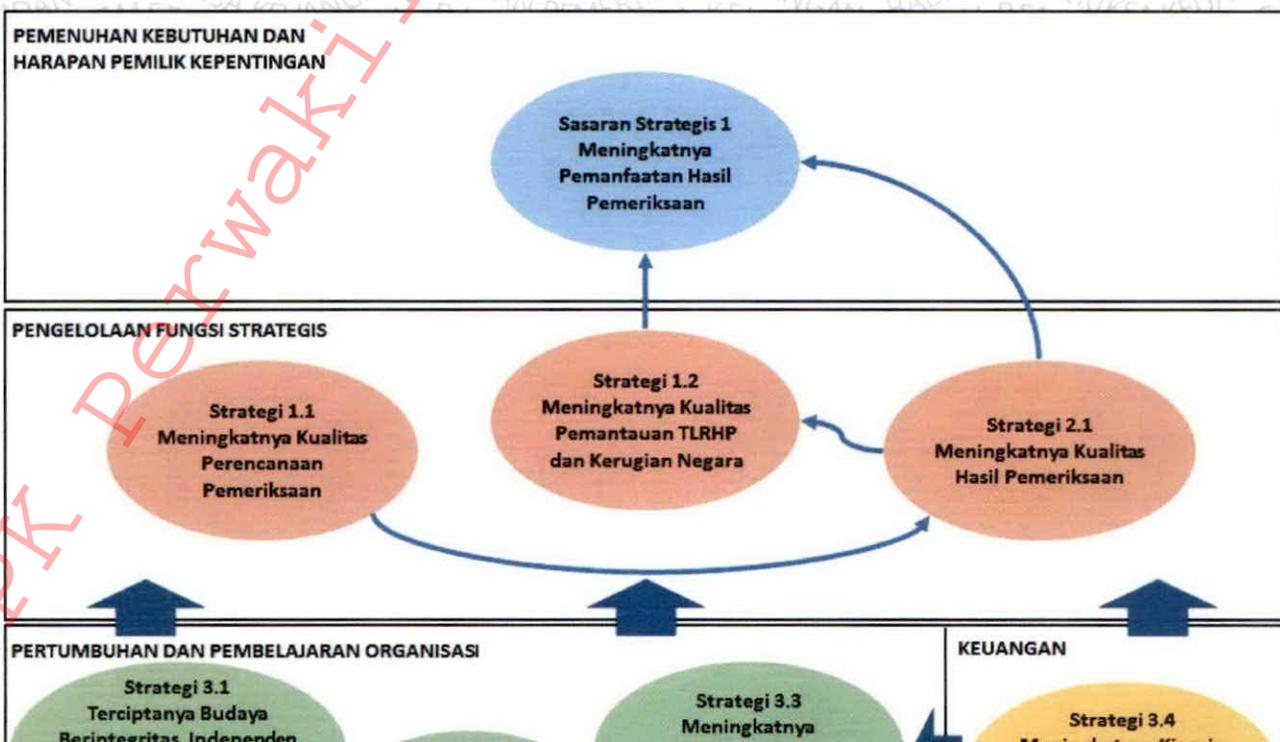
Nama : Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA., Ak.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PETA STRATEGI



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2019

Strategi	Indikator Kinerja	Target	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi <i>Itama</i> atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	3
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

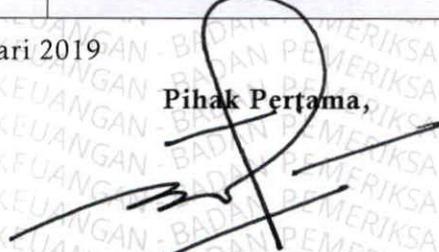
Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp42.751.382.000,00

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA., Ak.


Arman Syifa, S.S.T., M.Acc., Ak.

Diketahui oleh
Anggota V,



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp7.505.068.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp10.907.067.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp3.106.791.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp10.476.536.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp3.260.716.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp5.571.696.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.620.296.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp303.212.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Rp42.751.382.000,00

Jakarta, Februari 2019

Kepala Perwakilan
Provinsi Jawa Barat,